



PEMERINTAH
KOTA
CIMAHI



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023

Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lantai III
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Telp / Fax 022-6632197 Kota Cimahi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Cimahi dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2023 merupakan perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (transisi) Dinas Kesehatan tahun 2023-2026. Rencana kerja merupakan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator yang akan dicapai. Rencana Kerja tahun 2023 ini juga disusun dengan mempertimbangkan hasil capaian indikator kinerja tahun 2021, permasalahan yang dihadapi, serta usulan dari masyarakat pada saat Musrenbang.

Dalam penyusunan Rencana Kerja ini tentunya masih banyak kekurangan, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Terahir, ucapan termakasih dan penghargaan kami sampaikan kepada tim penyusun Rencana Kerja dan berbagai pihak yang telah bekerjasama dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini.

Cimahi, Juli 2022

**PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**



**dr. RERI MARLIAH, M.M.
NIP. 197205072006042016**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1. Maksud	5
2. Tujuan.....	5
D. SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2021	7
A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN	7
B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	64
1. Hasil Capaian Kinerja Tahun 2021 dibandingkan Target.	64
2. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya.....	65
3. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja terhadap Target RPJMD	65
4. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja terhadap Target Nasional	66
5. Hasil Capaian SPM	67
C. ISU STRATEGIS	68
D. TELAAH TERHADAP USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	77
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS KESEHATAN	81
A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	81
B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	82
1. Tujuan.....	82
2. Sasaran	82
C. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	85

1. Strategi.....	87
2. Kebijakan	88
3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	90
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.	108
BAB V PENUTUP	121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2021	7
Tabel 2.2	Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2021 berdasarkan Sumber Anggaran	8
Tabel 2.3	Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2021 berdasarkan Program	8
Tabel 2.4	Pagu Anggaran dan Realisasi Dinas Kesehatan Tahun 2021 berdasarkan Sumber Anggaran	9
Tabel 2.5	Monitoring Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021 .	11
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Utama tahun 2021	64
Tabel 2.7	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020-2021	65
Tabel 2.8	Perbandingan Capaian IKU Dinas Kesehatan Tahun 2021 terhadap Target Perubahan RPJMD dan Renstra Perubahan Tahun 2017-2022.....	66
Tabel 2.9	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2021 terhadap target Nasional	67
Tabel 2.10	Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2019-2021	67
Tabel 2.11	Sinkronisasi usulan Musrenbang Kecamatan dengan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023	78
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	83
Tabel 3.2	Capaian Indikator SDGs terkait Bidang Kesehatan Tahun 2021	86
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan 2023– 2026	88
Tabel 3.4	Rumusan Rancangan Awal Rencana Kegiatan Tahun 2023 serta perkiraan maju tahun 2024 Berdasarkan Forum OPD Bidang Kesehatan	96
Tabel 4.1	Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2023 berdasarkan Sumber Anggaran	108
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 (RKPD)	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Dinas Kesehatan disusun mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cimahi tahun 2023 dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja SKPD untuk menterjemahkan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Dalam sistem perencanaan daerah, rencana kerja SKPD mempunyai fungsi penting karena merupakan perencanaan pada unit organisasi terkecil di pemerintahan daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi. Penyusunan Renja SKPD dilaksanakan melalui 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antara usulan tingkat kelurahan dan kecamatan, kegiatan yang disusun di tingkat Dinas serta kajian di tingkat Kota, dan juga mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan lainnya baik itu yang diusulkan melalui APBD Kota, usulan ke Provinsi maupun ke tingkat pusat.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan *holistic tematik* dilaksanakan dengan

mempertimbangkan unsur / bagian / kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Penyusunan dokumen rancangan Renja 2022 ini, mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa Renja SKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja.

Imbas pandemi COVID-19, saat ini pemerintah pusat, provinsi dan daerah masih tetap fokus pada penanganan dan penanggulangan COVID-19 serta pemulihan ekonomi. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Pusat untuk tahun 2023 masih mencakup pada tujuh prioritas nasional sesuai RPJMN 2020-2024 yakni penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan sumber daya manusia, peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Selain itu, penguatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta perubahan iklim, kemudian stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Ketujuh prioritas nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi sosial yang terpadu dan terintegrasi.

Seluruh strategi tersebut dapat disusun dalam dokumen perencanaan daerah yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya di tahun 2023. Dengan adanya dokumen Renja Dinas Kesehatan tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan sesuai dengan rencana.

B. DASAR HUKUM

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2023 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);

19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 207);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 278);
21. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
22. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 139);
23. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 660, tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 140);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menjabarkan dokumen Rencana Strategis (transisi) Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2023-2026 sebagai acuan dalam perencanaan Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2023.

2. Tujuan

- a. Melakukan analisis kinerja pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2021 terhadap indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Mengakomodir berbagai kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan proses pembangunan bidang kesehatan di Kota Cimahi khususnya dan pembangunan kesehatan di Indonesia.

- c. Memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan sehingga pencapaian target tahunan RENSTRA dan RPJMD dapat dipastikan.
- d. Dokumen Rencana Kerja sebagai instrument akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja (LKIP) tahun 2023.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2023 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan.
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- C. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
- D. Telaah Terhadap Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN

- A. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS
KESEHATAN TAHUN 2021

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KESEHATAN

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengukur sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program, kegiatan serta sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan serta sub kegiatan dalam renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan di tahun 2021. Pada tahun 2021 Dinas Kesehatan Kota Cimahi mengelola Anggaran dari berbagai sumber antara lain anggaran yang bersumber dari APBD Kota Cimahi, APBD Provinsi dan APBN dengan total anggaran sebesar Rp. 168.032.528.819,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.1 Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2021

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)
1	BELANJA OPERASI	147.826.215.435,-
2	BELANJA MODAL	20.206.313.384,-
	TOTAL	168.032.528.819,-

Anggaran Belanja digunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, dan 13 (tiga belas) Puskesmas selama tahun 2021. Sumber anggaran berasal dari APBN, APBD Provinsi, DBHCHT, dan APBD Kota Cimahi serta Dana Kapitasi JKN bagi 13 Puskesmas. Adapun untuk rincian pagu anggaran Dinas Kesehatan tahun 2021 berdasarkan sumber anggaran ada pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2021 berdasarkan Sumber Anggaran

NO	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	%
1.	APBD MURNI	115.168.270.398,-	68,54
2.	KAPITASI JKN	20.824.647.171,-	12,39
3.	APBD PROVINSI	9.676.800.000,-	5,76
4.	APBN/DAK	18.755.300.000,-	11,16
5.	DBHCHT	3.607.511.250,-	2,15
	TOTAL	168.032.528.819,-	100,00

Berdasarkan tabel diatas persentase sumber anggaran terbesar berasal dari anggaran APBD Murni Kota Cimahi (68.54 %), anggaran kapitasi JKN di Puskesmas (12,39 %). Sementara itu anggaran yang besumber dari APBD Provinsi sebesar 5,76%, sedangkan anggaran yang bersumber dari Pemerintah pusat atau APBN/DAK pada tahun 2021 sebesar 11,16 %.

Anggaran sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang dan sekretariat serta di 13 Puskesmas. Pada tahun 2021 jumlah program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebanyak 5 program yaitu 4 program di Bidang dan 1 program yang dilaksanakan oleh Sekretariat. Adapun jumlah besaran anggaran di bidang sebanyak Rp. 93.275.935.427,- dan di sekretariat sebesar Rp. 74.756.593.992,-. Berikut tabel anggaran Dinas Kesehatan berdasarkan program yang dikelola pada tahun 2021.

Tabel 2.3 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2021 berdasarkan Program

NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	%	Sisa Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.756.593.392	63.577.523.437	85,05	11.179.069.945
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	84.768.081.821	58.531.812.905	69,05	26.236.268.916

NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	%	Sisa Anggaran
	Masyarakat				
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.310.980.606	7.414.624.280	89,21	896.356.326
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	48.139.000	45.646.000	94,82	2.493.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	148.734.000	128.661.600	86,50	20.072.400
	TOTAL	168.032.528.819	129.698.268.222	77,19	38.334.260.577

Anggaran belanja Dinas Kesehatan tahun 2021 sebesar Rp. 168.032.528.819,-, realisasi terhadap program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sebesar Rp. 129.698.268.222,- atau 77,19% turun 8.75% dari tahun 2020 (85,94%). Adapun rincian realisasi anggaran per program dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Pagu Anggaran dan Realisasi Dinas Kesehatan Tahun 2021 berdasarkan Sumber Anggaran

NO	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1.	APBD MURNI	115.168.270.398,-	87.003.569.248,-	75,54
2.	KAPITASI JKN/BLUD	20.824.647.171,-	17.433.456.699,-	83,72
3.	APBD PROVINSI	9.676.800.000,-	9.676.739.520,-	100
4.	APBN/DAK	18.755.300.000,-	11.976.991.505,-	63,86
5.	DBHCHT	3.607.511.250,-	3.607.511.250,-	100
	TOTAL	168.032.528.819,-	129.698.268.222,-	77,19

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2021 sebesar Rp. 168.032.528.819,- dengan realisasi belanja seluruhnya sebesar Rp. 129.698.268.222,- (77.18 %). Dari berbagai sumber anggaran tersebut realisasi anggaran terendah adalah realisasi anggaran bersumber APBN/DAK hanya sebesar

63,86%, hal ini disebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan karena menunggu juknis pelaksanaan kegiatan dari Kementerian Kesehatan. Realisasi kinerja secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Monitoring Evaluasi Renja Dinas Kesehatan Tahun 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	74.756.593.382	78,60	63.577.523.437	100,77	85,05	
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100		100		100		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100		100		100		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun;	3	51.501.800	3	44.402.400	100	86,22	
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen anggaran	4	27.001.900	4	22.101.000	100	81,85	
		Jumlah Dokumen Renja Dinas	1		1		100		
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan	1		1		100		
		Jumlah Dokumen Renstra Dinas	1		1		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Laporan Anggaran (Siscobikes)	1		1		100		
		Jumlah Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	2		2		100		
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1	24.499.900	1	22.301.400	100	91,03	
		Jumlah Dokumen Laporan SPM	1		1		100		
		Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ	2		2		100		
		Jumlah Dokumen Monev Kinerja	4		4		100		
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	1	49.906.203.240	1	42.817.148.998	100	85,80	
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan setiap	380	49.809.503.240	380	42.750.348.998	100	85,83	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		bulan							
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	12	96.700.000	12	66.800.000	100	69,08	
		Jumlah peserta pertemuan penyusunan laporan keuangan	290		250		86,21		
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Dibina;	390	212.315.000	390	153.242.000	100	72,18	
5)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah set pakaian kerja lapangan pegawai	85	24.905.000	85	24.650.000	100		
6)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	23	187.410.000	12	128.592.000	52,17	68,62	
		Jumlah peserta pembinaan	100		100		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		pegawai							
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;	12,00	663.143.900	12	522.144.855	100	78,74	
7)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12	10.002.600	12	9.295.330	100	92,93	
8)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan/ peralatan kantor	12	115.888.900	12	91.480.500	100	78,94	
		Jumlah bulan Penyediaan ATK	12		12		100		
		Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor	1		1		100		
9)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	1	69.824.500	1	55.245.500	100	79,12	
		Jumlah unit belanja modal peralatan rumah tangga	9		9		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
10)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	133.131.200	12	101.317.250	100	76,10	
11)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	159.304.700	12	132.938.500	100	83,45	
12)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitasi, Koordinasi, dan Konsultasi	12	174.992.000	12	131.867.775	100	75,36	
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan	12	204.038.481	12	182.921.400	100	89,65	
13)	Pengadaan Mebel	Jumlah pemeliharaan kursi	60	204.038.481	60	182.921.400	100	89,65	
		Jumlah pengadaan meubelair	43		43	-	100		
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa penunjang urusan	12	925.618.800	12	811.349.801	100	87,65	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
14)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Air	12	89.884.200	12	71.599.776	100	79,66	
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi	12		12		100		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Listrik	12		12		100		
15)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	835.734.600	12	739.750.025	100	88,51	
		Jumlah tenaga Non ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian	18		18		100		
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	12	1.969.125.000	12	1.612.857.284	100	81,91	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
16)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12	945.550.000	12	658.218.059	100	69,61	
		Jumlan bulan Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12		12		100		
		Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	26		26		100		
		Jumlah tenaga Non ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian	10		10		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
17)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Penyediaan jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	12	1.023.575.000	12	954.639.225	100	93,27	
		Jumlah tenaga NON ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian	18		18		100		
		Jumlah Paket pemeliharaan gedung	3		3		100		
8.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80	100	20.824.647.161	69,23	17.433.456.699	69,23	83,72	Terdapat 4 puskesmas dengan nilai SKM dibawah 80
18)	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Padasuka yang dilayani (50% dari total	12918	1.972.750.498	2.852	1.572.595.839	22,08	79,72	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		peserta JKN terdaftar)							
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,89		82,31		101,76		
		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Melong Asih yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	10.304	1.555.897.334	9694	1.359.912.821	94,08	87,40	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	78,35		80,16		102,31		
		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Melong Tengah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	6.143	954.446.800	6183	850.364.670	100,65	89,10	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,67		80		99,17		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta JKN di wilayah Puskesmas Cigugur tengah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	10892	1.739.902.758	8691	1.441.748.083	79,79	82,86	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79,01		80,8		102,27		
		Jumlah peserta JKN di wilayah puskesmas Cimahi Selatan yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	10752	1.634.882.060	10634	1.403.667.604	98,90	85,86	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,54		81,52		99,98		
		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cipageran yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	11982	1.949.459.500	11550	1.558.895.504	96,39	79,97	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,36		78,33		97,47		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cimahi Tengah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	12481	1.742.438.580	13111	1.381.826.883	105,05	79,30	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,46		81,55		100,11		
		Jumlah peserta JKN di wilayah Puskesmas Citeureup yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	9243	1.381.445.709	8805	1.279.224.413	95	92,60	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,39		83,1		102,10		
		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cimahi Utara yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	14681	2.762.477.877	24098	2.276.074.278	164,14	82,39	
		Nilai Survey Kepuasan	81,23		80,04		98,54		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Masyarakat							
		Jumlah Peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Pasirkaliki yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	4725	729.368.701	5148	646.811.656	108,95	88,68	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,6		77,48		96,13		
		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cibeureum yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	14032	2.101.147.951	14119	1.794.440.183	100,62	85,40	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	89,67		78,8		87,88		
		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cibeber yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	6635	1.030.620.600	10194	812.986.747	153,64	78,88	
		Nilai Survey Kepuasan	81,8		85		103,91		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Masyarakat							
		Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas Leuwigajah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	8115	1.269.808.793	7087	1.054.908.018	87,33	83,08	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,71	77,43			95,94	-	
II.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Utama	69,23	84.768.081.821	53,85	58.531.812.905	77,78	69,05	
		Rata-rata tingkat capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang diterapkan	83		98,37		118,52		
		Prevalensi stunting pada balita	10,8		10,18		94,26		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional (Pencapaian UHC)	96		98,64		102,75		
		Persentase Faskes Yang Mendapatkan Rekomendasi / Ijin	100		100		100		
		Cakupan keberhasilan Pengobatan TB	90		84,77		94,19		
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	90		91,80		102		
		Persentase Kasus dan KLB yang ditangani	100		100		100		
9.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskemas Dengan Sarana Dan Prasarana Sesuai Standar;	13	23.772.038.784	13	18.119.581.913	100	76,22	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
19)	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pembangunan gedung baru puskesmas	1	15.524.089.000	1	13.184.472.245	100	84,93	Pembangunan IPAL tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan analisa Tim perencanaan pembangunan, anggaran tidak mencukupi
		Jumlah Pembangunan sarana IPAL	1		0		-		
		Jumlah laporan perencanaan IPAL	1		0		-		
		Jumlah dokumen manajemen kontruksi	1		1		100		
		Jumlah bulan jasa pendukung kegiatan pembangunan puskesmas	12		12		100		
20)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah dokumen perencanaan	3	2.180.824.885	1	61.745.846	33,33	2,83	1.Rehab Puskesmas
		Jumlah dokumen pengawasan	3		0		0		Cimut tidak

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan	4		1		25		dapat dilaksanakan terkendala IMB
		Jumlah peserta rapat persiapan rehabilitasi puskesmas	50		50		100		2. IPAL Puskesmas Pasir kaliki tidak dapat dilaksanakan karena menurut perencanaan anggaran tidak mencukupi terkendala IMB 3. Canopy Puskesmas Cimahi Tengah tidak dilaksanakan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
									terkendala IMB 4. Rehab Puskesmas Melong Asih dilaksanakan
21)	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah unit antropometri	13	832.000.000	13	712.821.800	100	85,68	Tidak terealisasi karena turun tayang di e Katalog
		Jumlah unit mobil promkes	1		1		100		
22)	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan	53	1.126.176.000	38	609.599.995	71,70	54,13	
		Jumlah pengadaan alat kesehatan (AKI/AKB)	2		2		100		
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan	3		3		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		pemeliharaan alat kesehatan / penunjang medik							
23)	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis pengadaan obat yandas	74	4.108.948.899	74	3.550.942.027	100	86,42	
		Jumlah jenis pengadaan obat Covid	3		3		100		
		Jumlah jenis pengadaan Reagen dan BMHP	50		50		100		
		Jumlah peserta pertemuan pengelola obat dan Perbekkes Puskesmas	35		35		100		
		Jumlah kegiatan bongkar muat obat	100		100		100		
10.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator SPM dengan capaian lebih dari 80%	10	60.378.323.367	12	39.947.773.332	120	66,16	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Peningkatan Cakupan Kepesertaan JKN	3,3		3,53		106,97		
		Cakupan Balita Gizi Buruk yang ditangani	100		100		100		
		Cakupan penyelidikan Epidemiologi yang ditangani	100		100		100		
		Jumlah Kelurahan ODF	4		4		100		
		Jumlah bulan Laporan Sistem Kewaspadaan Dini Respon (SKDR) ;	12		12		100		
24)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10480	537.882.700	10.110	312.036.300	96,47	58,01	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
									Agustus
		Jumlah kegiatan pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil oleh tenaga SPOG	20		5		25		
		Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Rumah Sakit Rujukan	6		6		100		
		Jumlah kunjungan supervisi AKI & AKB ke fasyankes tingkat pertama & rujukan	260		-				
		Jumlah peserta konvergensi LP/ LS untuk penurunan AKI/ AKB	55		55		100		
		Jumlah peserta pembinaan AKI & AKB ke fasyankes Tingkat	35		35		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		pertama & rujukan							
		Jumlah peserta peningkatan SDM tingkat Kota Cimahi-ANC	60		60				
25)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10400	1.771.143.700	10.242	964.099.704	98,48	54,43	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	12		12		100		
		Persentase serapan anggaran jaminan persalinan	100		66,25		66,25		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta surveillance KIA, Audit Maternal Perinatal	320		155		48,44		
		Jumlah peserta konvergensi LP/ LS untuk penurunan AKI/ AKB terkait kespro & KB	50		50		100		
		Jumlah surveillance autopsi verbal kematian ibu & bayi	72		26		36,11		
		Jumlah peserta surveillance response kematian ibu & bayi	50		50		100		
26)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	9950	111.321.200	9.624	11.989.800	96,72	10,77	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta pelatihan/penyeliaan fasilitatif di puskesmas PONED	40		40		100		
		Jumlah peserta pembinaan AKI & AKB ke fasyankes tingkat pertama & rujukan	180		180		100		
27)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25.129	601.773.600	25.129	191.202.000	100	31,77	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Dokumen reviu PERDA KIBBLA	1		0		0		Reviu PERDA tidak dapat dilaksanakan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
									setelah konsultasi dengan bagian hukum
		Jumlah peserta kegiatan penguatan guru PAUD tentang buku KIA & SDIDTK	330		0		0		
28)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	69586	368.204.000	69.586	162.814.000	100	44,22	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Jumlah peserta Pertemuan Program UKS	34		34		100		Evaluasi sekolah sehat tidak

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Jumlah Display Data hasil kegiatan UKS	9		9		100		dapat dilaksanakan karena terkait pandemi, tidak ada proses pembelajaran tatap muka di sekolah
29)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Deteksi dini Faktor Risiko PTM bagi ASN Tingkat Kota Cimahi	1250	238.991.400	1.250	190.084.580	100	79,54	
		Deteksi IVA Test	1500		1.500		100		
		Jasa Petugas Penunjang P2PTM Keswa	12		12		100		
		Jumlah penduduk usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	247325		242.492		98,05		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Penguatan pandu PTM di FKTP	82		82		100		
		Jumlah peserta kegiatan monev Usia Produktif	144		144		100		
		Jumlah perusahaan yang mendapat sosialisasi hari Pendengaran Sedunia	6		6		100		
30)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	31712	206.432.500	31.712	100.872.500	100	48,86	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Jumlah peserta kegiatan bulan kesehatan lansia	615		615		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Jumlah alat/bahan kegiatan bulan kesehatan lansia	13		15		115,38		
		Jumlah peserta Pertemuan Program Lanjut usia	80		49		61,25		
31)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	57440	203.149.200	53.830	150.217.200	93,72	73,94	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Jumlah Pertemuan Program Hipertensi bagi petugas Fasyankes	98		72		73,47		
		Jumlah peserta skrining dan Pelayanan Hipertensi Tingkat	3000		3.000		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Kota Cimahi							
32)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	9716	172.995.000	9.716	118.485.540	100	68,49	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Jumlah peserta Pertemuan Program Diabetes Mellitus bagi petugas Fasyankes	98		82		83,67		
		Jumlah peserta Sosialisasi dan Pelayanan DM Tingkat Kota Cimahi	3300		3.300		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
33)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penanganan dan Pendampingan ODGJ Gaduh Gelisah	288	231.062.900	288	168.487.000	100	72,92	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	923		923		100		
		Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan NAPZA	113		109		96,46		
		Pendampingan pelayanan kesehatan jiwa dan FGD	26		19		73,08		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta Pertemuan program jiwa bagi petugas puskesmas, klinik dan RS	78		78		100		
34)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TB yang mendapat pelayanan TB sesuai standar	2550	284.794.300	2550	233.352.025	100,00	81,94	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Jumlah peserta jejaring internal hospital linkage.	90		90		100		
		Jumlah Investigasi Kontak	250		250		100		
		Bulan Jasa tenaga Administrator Penyakit Menular	12		12		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta Monitoring dan evaluasi program	38		38		100		
		Jumlah peserta Sosialisasi Program TB	64		64		100		
35)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah peserta Bimbingan teknis program	57	284.605.000	57	229.110.000	100	80,50	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Jumlah bulan jasa pengelola pelayanan program HIV	12		12		100		
		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan	6326		5.979		94,51		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		sesuai standar							
		Jumlah peserta kegiatan mobile VCT	100		100		100		
		Jumlah peserta Pertemuan Sosialisasi Program HIV	19		19		100		
		Jumlah peserta pemetaan populasi risti	120		120		100		
36)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah paket bahan pemeriksaan PCR	2000	5.796.944.100	0	1.952.076.450	0	33,67	Pembelian VTM tidak dilaksanakan, Raegen pemeriksaan PCR tidak akan diserap, sudah tersedia dari kemenkes

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Jumlah paket bahan pemeriksaan rapid antigen	10.000		10.000		100,00		
		Jumlah obat-obatan untuk P3K	1		0		0		tidak diserap, karena stok tercukupi
		Jumlah BHP untuk P3K	1		0		0		
		Jumlah shift kegiatan P3K dan Penanggulangan Bencana TGC	122		78		63,93		
		Jumlah bulan jasa tenaga administrasi pengelolaan KLB	12		10		83,33		
		Persentase realisasi anggaran hibah PMI	100		100		100		
37)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gizi	Jumlah paket pengadaan PMT	198	1.583.568.400	182	881.930.442	91,92	55,69	Rincian Bumil 70, baduta 40, balita 66
		Jumlah petugas pengumpulan dan pelaporan data gizi	420		0		0		Adanya pembatasan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		terintegrasi (TTD rematri)							pelayanan karena pandemi
		Jumlah peserta pertemuan pengumpulan dan pelaporan data gizi terintegrasi (EPPGM)	65		65		100		Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
38)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kader Pos UKK yang dilatih	30	126.101.000	30	56.543.000	100	44,84	
		Jumlah Kegiatan pengelolaan program pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	13		11		84,62		
		Jumlah ASN yang diperiksa	550		100		18,18		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		kebugaran							
		Jumlah karyawan instansi swasta yang diperiksa kebugaran	175		0		0		adanya pembatasan fisik selama masa pandemi dan terkemkala izin dari perusahaan
39)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah inspeksi Sarana Air Bersih (SAB) pada industri/fasilitas	30	712.215.500	30	578.439.540	100	81,22	
		Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12		12	0	100		
		Jumlah limbah medis yang dikelola	10.919		7.246,50	3.138	66,37		
		Jumlah Dokumen pelaporan survey study EHRA	1		1		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta peningkatan kapasitas petugas sosialisasi teknis TTG SAM rumah tangga bagi sanitarian	30		30		100		
		Jumlah sampel air bersih yang di periksa	75		75		100		
		Jumlah peserta pertemuan pengawasan eksternal orientasi higiene sanitasi DAM untuk pengelola/penjamah	30		30		100		
		Jumlah sampel air depot air minum yang diperiksa	60		60		100		
40)	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan Media Promosi Kesehatan	4	744.055.100	3	408.171.150	75	54,86	
		Jumlah media promosi yang mendapatkan pemeliharaan	5		4		80		
		Jumlah pengadaan pendukung PIK	1		1		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta Pembinaan dan monev program	48		35		72,92		
		Jumlah peserta pertemuan Orientasi KPP	50		0		0		KPP tidak dapat dilaksanakan
		Jumlah peserta kegiatan kampanye Lokal	200		200		100		
		Jumlah peserta kegiatan Intervensi Promkes	120		120		100		
		Jumlah peserta pertemuan kemitraan	40		35		87,50		
41)	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah bulan jasa pengelola administrasi program surveilans	12	119.888.000	12	64.042.000	100	53,42	
		Jumlah peserta sosialisasi penanggulangan kasus PD3I dan Pelaporan entry data SKDR	13		13		100		
		Jumlah laporan Penemuan Kasus Non PD3I	12		12		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta pertemuan kegiatan Jemaah haji	556		556		100		
		Jumlah sampel penyelidikan epidemiologi (PE)	56		12		21,43		
		Jumlah peserta pertemuan koordinasi program surveilans	13		13		100		
		Jumlah peserta pertemuan koordinasi pemeriksaan jemaah haji	90		90		100		
42)	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah peserta pertemuan pengelolaan upaya kesehatan khusus	160	59.500.000	40	58.777.500	25,00	98,79	Kegiatan terkendala karena pemberlakuan PPKM
		Jumlah peserta pertemuan koordinasi PIS-PK	156		156		100,00		
		Jumlah peserta pertemuan Sistem Pelayanan Rujukan	100		100		100,00		
43)	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan	Jumlah peserta pertemuan program endemik epidemik	120	787.012.200	80	430.092.972	66,67	54,65	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
	Tidak Menular	dan zoonosis							
		Jumlah Kegiatan pengendalian vektor	58		20		34,48		
		Jumlah kegiatan Pendampingan pelayanan dokter spesialis pada pelaksanaan pandu PTM di Puskesmas	13		12		92,31		
		Pengadaan belanja bahan habis pakai alat kedokteran	1		1		100		
		Jumlah pertemuan evaluasi dan sosialisasi program ISPA, Diare, dan Hepatitis)	8		4		50		
44)	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah bulan kegiatan verifikator dalam pengelolaan JKN	12	35.438.279.567	12	27.075.091.885	100	76,40	2.090.356.951

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta JKN yang dibayarkan oleh pemerintah daerah pembiayaan 60%	75.120		75.120		100		
		Jumlah peserta JKN yang dibayarkan oleh pemerintah daerah pembiayaan 40%	75.120		75.120		100		
		Jumlah bulan Pembayaran Pelayanan Kesehatan maskin di luar peserta JKN	12		12		100		
45)	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah deklarasi ODF	2	45.190.000	2	42.850.000	100	94,82	
		Jumlah pembinaan kota sehat tingkat provinsi	1		1		100		
		Jumlah pembinaan kota sehat tk. kota	13		13		100		
		Jumlah peserta pertemuan koordinasi tim pembina kota sehat	30		30		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta rapat koordinasi pra ODF	91		91		100		
46)	Operasional Pelayanan Puskesmasn (BOK)	Jumlah bulan jasa THL BOK Puskesmas	3	477.000.000	3	452.424.173	100	94,85	
47)	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jasa pendampingan konsulen KIPi	10	8.946.550.000	8	5.089.833.571	80	56,89	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Jumlah paket asuransi KIPi vaksin Covid 19	1		1		100		
		Jumlah pembelian Trash bag sampah medis	4592		0		0		pengadaan Trash bag tidak diserap karena sudah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
									tersedia
		Jumlah jenis bahan habis pakai; belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor	3		2		66,67		
		Jumlah bulan jasa tenaga Admininstrasi/tenga ahli IT	10		8		80		
		Jumlah jasa tim vaksinasi Covid 19	59.500		22.120		37,18		
48)	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan penilaian re akreditasi	7	370.839.000	0		0		Kegiatan Survey Akreditasi tidak dilaksanakan sesuai dengan arahan dari kemenkes, karena adanya PPKM

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
49)	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah peserta pertemuan koordinasi pelaksanaan imunisasi BIAS	450	158.825.000	450	24.750.000	100	15,58	
		Jumlah peserta pertemuan Audit KIPi	120		120		100		
		Jumlah peserta pertemuan persiapan pelaksanaan vaksin	140		0		0		
		Persentase realisasi asuransi KIPi	100		0		0		Tidak digunakan karena tidak ada kasus
11.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Ketepatan waktu pelaporan Puskesmas	95	214.000.470	92,30	183.205.000	97,16	85,61	
50)	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah jenis dokumen Profil Kesehatan	2	19.579.000	2	15.700.300	100	80,19	
		Jumlah Peserta Pertemuan Penyusunan Profil	36		36		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
51)	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan sistem dan jaringan LAN	13	72.452.700	11	57.180.000	84,62	78,92	
		Jumlah Peserta Pertemuan Pembuatan aplikasi SIMPUS	92		92		100		
		Jumlah pengadaan Harddisk eksternal	5		5		100		
52)	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan perangkat Komputer	1	121.968.770	1	110.324.700	100	90,45	
		Jumlah Pengadaan Printer	7		7		100		
		Jumlah Pengadaan perangkat Laptop	5		5		100		
		Jumlah Perlengkapan Video Conference	1		1		100		
		Jumlah Camera Video	1		1		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
12.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Baik	3	403.719.200	3	281.252.660	100	69,67	
53)	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah peserta pertemuan Penilaian Kinerja Puskesmas	45	403.719.200	45	281.252.660	100	69,67	
		Jumlah peserta pertemuan kegiatan Survey Kepuasan	45		55		122,22		
		Jumlah peserta pertemuan Akreditasi untuk Puskesmas	120		60		50		
III.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tingkat Pemenuhan Standar Minimal Tenaga Kesehatan	95	8.310.980.606	100	7.414.624.280	105,26	89,21	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
13.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Rencana kebutuhan SDM ;	1	8.310.980.606	1	7.414.624.280	100,00	89,21	
54)	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Nakes Non ASN yang mendapatkan insentif	330	2.922.000.000	330	2.119.509.674	100	72,54	
55)	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah peserta pembinaan jabatan fungsional	45	5.388.980.606	35	5.295.114.606	77,78	98,26	
		Jumlah peserta Pertemuan pembinaan SDM per profesi	105		70		66,67		
		Jumlah tenaga yang mendapat insentif Covid	446		446		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
IV.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian dan Penyediaan Makanan dan Minuman yang dibina dan sesuai standard	96	48.139.000	100	45.646.000	100	94,82	
14.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotik, toko obat, optik, UMOT yang mendapat rekomendasi	100	2.300.000	100	2.300.000	100	100,00	
56)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah peserta pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan	60	2.300.000	60	2.300.000	100	100,00	Dilaksanakan secara daring / zoom meeting

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
15.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana IRTP yang diaudit	100	37.914.000	100	35.421.000	100	93,42	
57)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang	Jumlah peserta pertemuan PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan)	120	37.914.000	120	35.421.000	100	93,42	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
	dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
		Jumlah sampel pemeriksaan post market yang diperiksa	50		13		26		Kegiatan terkendala karena pemberlakuan PPKM
16.	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapat rekomendasi	100	7.925.000	100	7.925.000	100	100,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
58)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah peserta pelatihan laik Hygiene Sanitasi Pengelolaan jasa boga / Rumah makanan	25	7.925.000	25	7.925.000	100	100,00	
V.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS	53	148.734.000	56,07	128.661.600	105,79	86,50	
17.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perkantoran	10	23.775.000	10	15.286.000	100	64,29	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
	Daerah Kabupaten/Kota								
59)	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dan Pengembangan SBH	15	23.775.000	15	15.286.000	100	64,29	
		Pembinaan/Penguatan Kemitraan GERMAS Tingkat Kota	1		1		100		
18.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan strata RW Siaga aktif minimal Purnama	60	95.015.000	60	84.256.600	100	88,68	
60)	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan	Jumlah peserta pembinaan Kelurahan Siaga Sehat	30	95.015.000	30	84.256.600	100	88,68	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
	Sehat								
		Monitoring dan evaluasi pendataan PHBS rumah tangga	30		30		100		
19.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pembinaan UKBM	120	29.944.000	120	29.119.000	100	97,24	
61)	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah peserta Pertemuan Penyusunan Laporan Bagi Kader	40	29.944.000	40	29.119.000	100	97,24	
		Jumlah peserta Pembinaan	80		80		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	K	Rp	
		UKBM							
	JUMLAH ANGGARAN TOTAL DINKES			168.032.528.819					
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					129.698.268.222		77,19	
	TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							90.65	

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran pencapaian sasaran pembangunan kesehatan diukur dengan menggunakan indikator-indikator pembangunan kesehatan mulai dari Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan (IKU) hingga indikator tujuan Indeks Kesehatan. Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

1. Hasil Capaian Kinerja Tahun 2021 dibandingkan Target.

Adapun hasil pencapaian untuk indikator Indeks Kesehatan tahun 2021 adalah sebesar 83,40 melebihi dari yang ditargetkan sebesar 82,94 (100,55%). Parameter dalam pencapaian Indeks Kesehatan adalah AHH (Angka Harapan Hidup). AHH Kota Cimahi Tahun 2021 adalah 74,21. Sementara itu untuk pengukuran kinerja dari sasaran strategi akan diukur berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan yang terdiri dari Rasio Kematian Ibu (AKI), Rasio Kematian Bayi (AKB). Berikut tabel hasil pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan di tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Utama tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA	KRITERIA PENILAIAN
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul						
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat						
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Rasio Kematian Ibu/100.000 KH	115,5	196,08	30,24%	Sangat Rendah
		Rasio Kematian Bayi/1000 KH	6,5	7,06	91,40%	Sangat Tinggi

Capaian indikator sasaran/indikator kinerja utama Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi di tahun 2021 menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi 91,40% untuk Rasio Kematian Bayi per 1000 KH, capaian kinerja sangat rendah 30,24% untuk Rasio Kematian Ibu per 100.000 KH. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Capaian Tahun Sebelumnya

Capaian Kinerja Dinas Kesehatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja)	2020				2021			
		Target	Realisasi	Capaian %	Penilaian	Target	Realisasi	Capaian %	Penilaian
1.	Rasio Kematian Ibu/100.000 KH	101,5/100.000 KH	115,82	85,33	Tinggi	115,5	196,08	30,24	Sangat Rendah
2.	Rasio Kematian Bayi/1000 KH	7/1000 KH	6,66	104,86	Sangat Tinggi	6,5	7,06	91,40	Sangat Tinggi
3.	Indeks Keluarga Sehat	0,41	0,22	53,66	Rendah				

Berdasarkan tabel diatas terlihat capaian indikator kinerja Rasio Kematian Ibu/100.000 KH tahun 2021 sebesar 30,24% mengalami penurunan kinerja sebesar 55,09% dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu 85,33%. Capaian indikator kinerja Rasio Kematian Bayi/1000 KH tahun 2021 adalah 91,40% mengalami penurunan sebesar 13,46% dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu 104,86%.

Hasil capaian Indikator Sasaran/Indikator Kinerja Utama kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi di tahun 2021 menunjukan capaian kinerja yang dengan kriteria sangat tinggi untuk indikator kinerja AKB, capaian kinerja kriteria sangat rendah untuk indikator AKI. Dari 2 (dua) indikator Kinerja pada Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis sudah memenuhi target yaitu AKB dengan 7,06/1000 KH dari 6,5/1000 KH. Sementara target Indikator Kinerja Sasaran Strategis belum mencapai target yaitu AKI dengan capaian 196,08/100.000 KH dari target 115,5/100.000, sedangkan Indeks keluarga Sehat (IKS) tidak menjadi indicator kinerja ditahun 2021.

3. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja terhadap Target RPJMD

Kinerja tahun anggaran tahun 2021 merupakan Target kinerja tahun pertama pada dokumen Perubahan RPJMD dan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan tahun 2017-2022. Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target RPJMD dan renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 8 Perbandingan Capaian IKU Dinas Kesehatan Tahun 2021 terhadap Target Perubahan RPJMD dan Renstra Perubahan tahun 2017-2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran/IKU	Realisasi 2021	Capaian Kinerja %	Target Akhir Renstra (2022)	Capaian RPJMD %
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul					
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat					
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rasio Kematian Ibu/100.000 KH	196,08	30,24%	115.2	29,79
	Rasio Kematian Bayi/ 1000 KH	7,06	91,40%	6.4	89,71

Dari tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 terhadap target akhir Renstra perubahan 2017-2022 dapat dijelaskan bahwa realisasi indikator Rasio Kematian Ibu/100.000 KH pada tahun 2021 sebesar 196,08/100.000 KH dengan tingkat capaian sebesar 29,79% diakhir tahun Renstra 2022 (Target 115,2/100.000 KH). Realisasi indikator angka kematian bayi pada tahun 2021 sebesar 7,06/1000 KH dengan tingkat capaian sebesar 89,71% diakhir tahun Renstra 2022 (Target 6,4/100.000 KH).

4. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja terhadap Target Nasional

Acuan Nasional yang digunakan sebagai perbandingan capaian kinerja khususnya untuk indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/I/836/2020 tentang Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Perbandingan capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2021 terhadap target Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2021 terhadap target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran/ IKU	Realisasi Kota Cimahi 2021	Target Nasional Tahun 2021	Interpretasi
Sasaran Strategis: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Rasio Kematian Ibu/100.000 KH	196,08	217/100.000 KH	Tercapai
	Rasio Kematian Bayi/1000 KH	7,06	19,5/1000 KH	Tercapai

Berdasarkan tabel perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2021 terhadap target Nasional terlihat bahwa capaian indikator sasaran tercapai karena masih dibawah angka target Nasional. Capaian indikator Rasio Kematian Ibu/100.000 KH Kota Cimahi tahun 2021 tercapai dengan realisasi 196,08/100.000KH dengan target Nasional yaitu 217/100.000 KH. Demikian juga dengan capaian indikator Rasio Kematian Bayi/1000 KH Kota Cimahi tahun 2021 tercapai dengan realisasi 7,06/1000 KH, dimana target Nasional yaitu 19,5/1000 KH.

5. Hasil Capaian SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2019, menjadi kinerja Dinas Kesehatan. Berikut ini capaian kinerja SPM bidang kesehatan tahun 2019-2021:

Tabel 2. 10 Capaian SPM Bidang KesehatanTahun 2019-2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET (%)	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	95,09	88,19	96,47
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	97,31	94,21	98,48
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	94,95	91,67	96,72
4	Pelayanan kesehatan balita	100	53,93	60,24	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	69,94	87,59	100

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET (%)	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	90,08	69,44	98,05
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	70,26	63,92	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	72,96	37,82	97,20
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	98,36	100,81	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	114,32	119,1	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	100	74,06	48,55	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	100	69,02	79,45	93,55

C. ISU STRATEGIS

Isu strategis Dinas Kesehatan merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan karena berpengaruh signifikan bagi daerah di masa datang. Isu strategis dirumuskan dengan memperhatikan dan menyelaraskan informasi tentang hasil kajian permasalahan kesehatan yang ditemukan di Kota Cimahi; analisis RPJM; Renstra Kementerian Kesehatan dan Provinsi Jawa Barat; Renstra Pemerintah Kota Cimahi, dan tentunya Renstra Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Untuk itu, disimpulkan bahwa isu strategis bidang kesehatan di Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

Berikut uraian mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan program di Dinas Kesehatan.

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Tren Rasio Kematian Ibu maupun Kematian Bayi selama beberapa tahun terakhir masih fluktuatif. Rasio kematian ibu tahun 2018 sebesar 113,98/100.000 KH, tahun 2019 sebesar 102,18/100.000 KH, tahun 2020 sebesar 115,82/100.000 KH dan pada tahun 2021 sebesar 196,08/100.000 KH. Kondisi ini perlu mendapat perhatian, serta upaya strategis dan komprehensif untuk mencapai target Rasio Kematian menjadi 115,2/100.000 KH pada akhir Renstra tahun 2022. Rasio Kematian bayi tahun 2018 sebesar

4,17/1000 KH, tahun 2019 sebesar 5,83/1000 KH, tahun 2020 sebesar 6,66/1000KH dan tahun 2021 sebesar 7,06/1000 KH. Pada akhir Renstra tahun 2022, rasio kematian bayi diharapkan turun menjadi 6,4/1000 KH.

2. Belum tercapainya target capaian angka stunting pada balita

Angka stunting pada balita di Kota Cimahi tahun 2021 sebesar 10,18% menurun sebesar 0,71% dibandingkan tahun 2020 yaitu 10,89%. Angka ini masih dibawah prevalensi nasional berdasarkan Riskesdas tahun 2018 sebesar 31,1%. Walaupun demikian stunting perlu menjadi perhatian, karena Stunting yang telah terjadi bila tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan, lemahnya kognitif dan psikomotorik terhambat, lebih mudah terkena penyakit degeneratif, dan menurunkan kualitas sumber daya manusia.

Selain masalah stunting, masalah gizi lainnya adalah masih tingginya balita gizi buruk, sangat kurus dan masalah gizi mikro lainnya dimasyarakat. Masalah gizi dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain infeksi, faktor lingkungan, daya beli dan pola asuh. Angka Balita Gizi Buruk di Kota Cimahi Tahun 2021 0,13% (24 kasus per 32044 balita).

3. Belum Optimalnya upaya penyehatan lingkungan,

Hal ini ditandai dengan masih rendahnya cakupan rumah sehat, cakupan jamban sehat, dan akses masyarakat terhadap air bersih yang memenuhi syarat kesehatan, serta masih banyaknya tempat pengelolaan makanan yang belum memenuhi syarat kesehatan, tempat-tempat umum serta industri yang belum memenuhi syarat kesehatan. Dari hasil pemeriksaan sampel air bersih, masih ditemukan air bersih tidak memenuhi syarat kesehatan seperti berbau, terdapat kandungan kimia (besi, mangan, klorida), dan secara bakteriologis masih ditemukan coliform pada beberapa sampel air bersih yang digunakan oleh masyarakat. Pada pemeriksaan sampel makanan (jajanan sekolah) juga masih ditemukan bahan pewarna yang tidak aman (rodhamin), Boraks dan coliform.

Terdapat Kelurahan yang belum mendeklarasikan sebagai kelurahan ODF (*Open Defecation Free*) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan. Terdapat 4 kelurahan yang sudah *Open Defecation Free* (ODF) dari 15 kelurahan di Kota Cimahi atau 26,7%, yaitu Kelurahan Cibeber, Cipageran, Citeureup, Padasuka. Kendala dalam pelaksanaan ODF diantaranya kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang jamban sehat, dimana jamban belum menjadi kebutuhan dasar dan belum merasakan dampak/akibat dengan tidak mengakses jamban sehat. Terbatasnya lahan untuk membuat *septic tank* dan belum adanya Peraturan Daerah terkait dengan penggunaan Jamban Sehat juga menjadi kendala dalam pelaksanaan STBM di Kota Cimahi. Perlu meningkatkan Sosialisasi STBM, meningkatkan komitmen dan kepedulian dari pemerintah dalam mengatasi masalah sanitasi dengan menganggarkan kegiatan yang mengarah percepatan ODF, seperti pembuatan jamban, pembangunan MCK atau *septic tank communal*. Upaya lain yang perlu dilaksanakan adalah Pemicuan di kelurahan yang masih belum ODF untuk meningkatkan kemandirian masyarakat secara total dalam mengatasi masalah sanitasi bagi dirinya selain memberi alternatif dengan membentuk Arisan jamban, upaya menggalang CSR dari pihak swasta, peningkatan kerjasama lintas sektor, menggalang dukungan dari dunia pendidikan, pelatihan wira usaha sanitasi (Wusan), pelatihan STBM bagi kader PKK, mengevaluasi dan *update* data STBM dari sanitarian Puskesmas guna mendukung percepatan ODF.

4. Belum Optimalnya Pemberdayaan masyarakat dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Belum optimalnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta dukungan Lintas Sektor dalam meningkatkan PHBS baik PHBS Rumah Tangga maupun tatanan lainnya. Salah satu bentuk dari pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan yaitu terbentuknya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang terorganisir dalam wadah desa/kelurahan siaga aktif. Tujuan dari desa siaga aktif yaitu mempercepat terwujudnya masyarakat desa/kelurahan yang peduli, tanggap dan

mampu mengenali serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, sehingga derajat kesehatannya meningkat.

Dengan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan. Untuk itu pembangunan kesehatan harus mampu membangkitkan dan mendorong peran aktif masyarakat sehingga terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Keberhasilan program pengembangan PHBS sangat ditentukan peran serta lintas sektor di luar sektor kesehatan, partisipasi dunia usaha dan peran serta masyarakat itu sendiri. Kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dan kegiatan PHBS masih belum optimal, antara lain disebabkan oleh:

- a. Belum optimalnya dukungan dari lintas sektor maupun unsur terkait.
 - b. Anggapan bahwa kegiatan pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab sektor kesehatan.
 - c. Kesadaran masyarakat terhadap PHBS masih kurang, masyarakat baru merasa penting terhadap kesehatan kalau sudah sakit. Kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok adalah hal yang hingga kini terus ditingkatkan oleh semua pihak terutama Dinas Kesehatan, bukannya tanpa alasan, aktivitas merokok baik perokok aktif maupun perokok pasif dapat membahayakan kesehatan untuk semua kalangan yang terkena paparan asapnya. Oleh karena itu untuk dapat mengurangi dampak dari rokok terhadap kesehatan dilakukan berbagai upaya antara lain : penyusunan regulasi kawasan tanpa rokok (KTR), pembatasan iklan rokok, peningkatan regulasi Peraturan Wali Kota, KTR menjadi Peraturan Daerah KTR, melaksanakan sosialisasi bahaya merokok terhadap semua kalangan.
5. Belum Optimalnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Kasus penyakit HIV-AIDS, Tuberkulosis dan Demam Berdarah Dengue (DBD) cenderung terus mengalami peningkatan bahkan sampai terjadi kematian. Seperti halnya pada permasalahan tingkat Nasional, Kota Cimahi pun mengalami *double burden disease* dimana permasalahan penyakit menular masih menjadi beban sementara itu di sisi lain permasalahan penyakit tidak menular muncul secara bersamaan dan menjadi beban utama. Prevalensi hipertensi dan Diabetes Melitus (DM) memiliki kecenderungan terus meningkat, begitu pula halnya dengan permasalahan kesehatan jiwa.

Kecenderungan meningkatnya kasus HIV-AIDS terjadi karena hubungan seksual berisiko, pertukaran jarum suntik bekas terutama pada pengguna NAPZA dan penularan dari ibu positif HIV-AIDS ke bayinya.

Trend penemuan kasus TB selama lima tahun terakhir terus meningkat dan pada dua tahun terakhir telah mencapai target. Pada empat tahun terakhir angka kesembuhan TB telah mencapai target. Keberhasilan capaian kinerja yang ditunjukkan dari peningkatan penemuan kasus sejalan dengan adanya peningkatan dukungan SDM kesehatan, fasilitas kesehatan dan peran serta fasilitas pelayanan kesehatan swasta juga partisipasi masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kader Pemantau Minum Obat (PMO).

Adanya kecenderungan peningkatan kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi, stroke, Diabetes Melitus, Kanker, dll. Akibat dari perubahan gaya hidup masyarakat yang serba instan maka terjadi pergeseran penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular (degeneratif). Hal ini bisa dilihat dengan adanya perubahan komposisi 10 besar penyakit, dimana hipertensi, stroke dan diabetes menempati urutan teratas. Penyakit- penyakit ini mulai bergeser kepada usia muda (usia kurang dari 40 tahun), sehingga berdampak menurunnya produktifitas.

6. Belum Optimalnya Pembiayaan Kesehatan

Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Tahun 2021 adalah sebesar 98,64 % dimana proporsi kepesertaan terdiri dari:

Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 40,38%, penerima bantuan Iuran APBN sebesar 21,01%, pekerja bukan penerima upah (PBPU) sebesar 19,93%, penerima bantuan iuran (PBI) APBD sebesar 13,80% dan bukan pekerja sebesar 3,50%. Kepesertaan JKN di Kota Cimahi didominasi oleh segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Peran serta Pemerintah Daerah dalam memberikan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat mencapai 34,82 % yang terbagi Pembiayaan oleh Pemerintah Pusat (APBN) sebesar 21,01 % dan Pembiayaan oleh Pemerintah Daerah (APBD) sebesar 13,80%. Anggaran dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Tahun 2021 bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 9.676.739.520,- DBHCHT sebesar Rp 3.607.511.250,- APBD Kota Cimahi sebesar Rp 15.427.359.150,- Dana tersebut digunakan untuk membiayai masyarakat miskin dan tidak mampu Kota Cimahi yang memiliki Jaminan Kesehatan Nasional.

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang terdaftar di BPJS Kesehatan diberikan pelayanan kesehatan melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama baik milik Pemerintah yaitu puskesmas maupun swasta. Jumlah besaran kapitasi yang diperoleh FKTP tergantung jumlah peserta yang terdaftar di FKTP tersebut. Dalam Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama disebutkan bahwa besaran pembayaran kapitasi JKN di FKTP dinilai berdasarkan capaian kinerja yaitu : angka kontak (minimal 150 %_o), Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik/RRNS (maksimal 2%) dan Rasio Peserta Prolanis Terkendali/RPPT (minimal 5%).

Di awal program JKN, kepesertaan terfokus pada FKTP milik Pemerintah, akan tetapi seiring berkembangnya program JKN bertambah pula FKTP milik swasta di Kota Cimahi. Peserta terdaftar di FKTP milik Pemerintah pada tahun 2021 sebanyak 257.404 jiwa sementara total seluruh peserta JKN di Kota Cimahi sebanyak 552.872 jiwa yang berarti 46,55 % peserta JKN terdaftar di FKTP

milik pemerintah, kepesertaan lebih banyak terdaftar di FKTP milik swasta. Untuk itu maka diperlukan peningkatan kualitas pelayanan di FKTP milik pemerintah agar masyarakat lebih banyak mendaftar di FKTP milik pemerintah sehingga dampaknya pendapatan di FKTP akan bertambah dan FKTP milik Pemerintah dapat melakukan pelayanan yang optimal terkendali mutu dan biaya.

7. Belum Optimalnya Akreditasi Puskesmas

Pada tahun 2021, Puskesmas di Kota Cimahi telah semua terakreditasi dengan status 1 puskesmas status paripurna, 6 puskesmas status utama, 5 puskesmas status madya dan 1 puskesmas status dasar. Terakhir penilaian akreditasi dilaksanakan pada tahun 2019, pada tahun 2020 dan 2021 tidak dapat dilaksanakan karena kondisi pandemi COVID-19. Target status akreditasi Kota Cimahi pada renstra tahun 2017 s.d 2022 adalah seluruh puskesmas terakreditasi dengan status utama, sampai tahun 2021 target ini belum tercapai baru ada 7 puskesmas atau 53,86 % dengan statusnya minimal utama.

Permasalahan dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas adalah keterbatasan lahan, pembangunan puskesmas sulit untuk menyesuaikan dengan standar akreditasi. Puskesmas Cimahi Utara lahannya masih menyatu dengan kantor Kecamatan Cimahi Utara, Puskesmas Cibeureum menyatu dengan Kantor Kelurahan Cibeureum, Puskesmas Pasirkaliki masih pinjam lahan milik TNI dan Puskesmas lainnya luas lahan yang terbatas sehingga sulit untuk pengembangan fisik. Akibatnya beberapa puskesmas terkendala dalam pembuatan IMB Puskesmas yang merupakan salah satu syarat dalam membuat ijin operasional puskesmas dan salah satu persyaratan dalam penilaian akreditasi.

Permasalahan lainnya adalah berdasarkan Surat Edaran No.HK.02.01/Menkes/455/2020 tentang Perijinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bahwa status akreditasi masih berlaku 1 tahun setelah di cabut status darurat, meskipun diberi waktu 1 tahun setelah

pencabutan status darurat, tetap harus di persiapkan penilaian reakreditasi puskesmas untukantisipasi pencabutan status darurat tersebut karena status akreditasi sebagai salah satu syarat kerjasama dengan BPJS.

8. Belum Optimalnya Sistem manajemen Informasi Kesehatan

Permasalahan inti yang dihadapi dalam Sistem Informasi Kesehatan (SIK) adalah bahwa sistem ini belum menjadi alat pengelolaan pembangunan kesehatan yang efektif mulai dari cara pengumpulan data, pengolahan, analisis data hingga penyajian informasi. Sumber data dan informasi diperoleh dari laporan kegiatan bidang-bidang pada Dinas Kesehatan, Puskesmas serta lintas sektor sebagai jejaring. Hasil evaluasi kinerja kegiatan SIK memperlihatkan bahwa pemenuhan data dan informasi yang berkualitas belum tercapai.

Ditinjau dari aspek input, berbagai faktor yang menjadi penyebabnya adalah kurang tersedianya data dan informasi yang memadai, sesuai kebutuhan serta tepat waktu; keterbatasan sumber daya manusia kesehatan khususnya di bidang Teknologi Informasi baik secara kuantitas maupun kualitas terutama kompetensi analisis data; keterbatasan sarana dan prasarana serta pembiayaan terutama dalam pengelolaan yang berkelanjutan.

Untuk optimalisasi sistem pelaporan, Dinas Kesehatan telah membangun Sistem Informasi Dokumen Laporan *Online* (SiIDOLA) yang merupakan model pengiriman laporan Puskesmas kepada Dinas Kesehatan secara *online* untuk efektivitas dan efisiensi dalam penyerahan laporan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan serta Integrasi sistem pelaporan dokumen untuk mencapai manajemen arsip yang baik dan kemudahan dalam proses monitoring semua jenis laporan.

Dengan adanya pengembangan Pelayanan Kesehatan berbasis TIK (*e-Health*) diharapkan dapat meningkatkan akurasi data dan kecepatan dalam penyediaan data sebagai sumber informasi dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan efisiensi dalam proses kerja serta memperkuat transparansi informasi.

9. Pandemi COVID-19

Kondisi Pandemi COVID-19 sejak Maret 2020, menyebabkan perubahan diberbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh pada aspek kesehatan masyarakat. Pelaksanaan program-program bidang kesehatan terfokus pada penanganan COVID-19. Pada tahun 2021 Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kota Cimahi sebanyak 10.618 kasus, pasien sembuh 10.443 dan meninggal 238 kasus.

Penanganan pandemi COVID-19 membutuhkan 1) kemitraan berbagai pihak dan kesiapan sumber daya manusia pendukung; 2) Peran tenaga kesehatan sangat penting dalam penanganan COVID-19 pada setiap level intervensi, melakukan *contact tracing* dan *tracking* (penyelidikan kasus dan investigasi wabah), serta pelaksanaan vaksinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat; 3) Pemerintah Daerah perlu melakukan komunikasi dan edukasi masyarakat terkait protokol kesehatan untuk melawan COVID-19.

10. Belum Tercapainya Target SPM Bidang Kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Permendagri nomor 100 tahun 2021. Standar Teknis Pemenuhan SPM diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar. Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdapat 12 (dua belas) jenis layanan dasar.

Realisasi capaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2021 sebagai berikut: Pelayanan kesehatan ibu hamil 96,47%; Pelayanan kesehatan ibu bersalin 98,48%; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 96,72%; Pelayanan kesehatan balita 100%; Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100%; Pelayanan kesehatan pada usia produktif 98,05%; Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100%; Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 97,02%; Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 100%; Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100%; Pelayanan

kesehatan orang terduga TB 100%; Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*HIV*) 93,55%.

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan perlu mendapat perhatian khusus. Pencapaian target-target SPM menjadi indikator penilaian kinerja Kepala Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara. Perlu pemetaan kondisi awal SPM dan kemampuan daerah terkait penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Perhitungan rencana pembiayaan kegiatan mendukung SPM dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan.

D. TELAAH TERHADAP USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam penyusunan rencana kerja tahun 2023 tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan lintas sektor. Melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RW, Kelurahan, Kecamatan terdapat usulan-usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat dan lintas sektor yang merupakan salah satu bentuk konsultasi publik.

Perencanaan yang bersifat bottom up ini akan mengakomodir usulan-usulan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan di dinas kesehatan. Berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2021 tingkat Kecamatan se-Kota Cimahi untuk perencanaan kegiatan tahun 2023, didapatkan beberapa usulan masyarakat di bidang kesehatan.

Tabel 2. 11 Sinkronisasi usulan Musrenbang Kecamatan dengan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023

USULAN MUSYAWARAH KECAMATAN			RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023		
NO	KELOMPOK USULAN	LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	- Penambahan Kuota (KIS, JAMKESDA, JAMPERSAL DAN BPJS - Peningkatan Kesehatan Masyarakat	- Kec Cimahi Selatan - Kecamatan Cimahi Utara - Kec Cimahi Tengah	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
2.	Pencegahan Stunting / Gagal tumbuh kembang Anak / Gizi Buruk	- Kec Cimahi Selatan - Kec Cimahi Tengah - Kec Cimahi Utara	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
3.	PHBS	Kecamatan Cimahi Utara Kec Cimahi Tengah	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

USULAN MUSYAWARAH KECAMATAN			RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023		
NO	KELOMPOK USULAN	LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
4.	Peningkatan dan Perbaikan Sarana Puskesmas	Kecamatan Cimahi Utara	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
5.	Pengadaan Alat Kesehatan	Kecamatan Cimahi Utara	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6.	Pelayanan Kesehatan Lansia	Kecamatan Cimahi Utara	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
7.	Sosialisasi Pembinaan, Pencegahan, Penanggulangan dan Pencegahan Pandemi	Kecamatan Cimahi Utara	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi

USULAN MUSYAWARAH KECAMATAN			RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2023		
NO	KELOMPOK USULAN	LOKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Perorangan	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kejadian Luar Biasa (KLB)
8.	Pembangunan PKM Baros	Kec Cimahi Tengah	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas
9.	Penyuluhan Bahaya Narkoba dan HIV Aids	Kec Cimahi Tengah Kecamatan Cimahi Utara	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Dan Perorangan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS KESEHATAN

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2023 memasuki tahun pertama dari Renstra (transisi) Dinas Kesehatan periode 2023-2026. Seperti kita ketahui bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pencapaian visi misi daerah, karena dalam perencanaan tersebut terdapat kegiatan, tahapan, maupun strategi dalam mencapai target akhir pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi daerah. Dalam konteks nasional, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan PP No 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran. Penganggaran memiliki peranan penting agar perencanaan dapat terlaksana secara optimal.

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya *output* dari perencanaan adalah penganggaran. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah, menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Dokumen RKPD dan APBD merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang saling berkaitan, sehingga perlu adanya penekanan sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah seperti Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat

daerah menjadi acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik. Penyusunan dokumen perencanaan menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan rencana kerja tahunan telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pelaksanaan musrenbang tingkat kelurahan hingga musrenbang nasional. Pemerintah pusat telah menyiapkan strategi dalam upaya perbaikan akibat wabah pandemik ini.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

1. Tujuan

Dinas Kesehatan dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota melakukan upaya pembangunan kesehatan masyarakat dengan tujuan :

- 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan
- 2. Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia

2. Sasaran

Sasaran dirumuskan untuk menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan pencapaian program dan kegiatan selama lima tahun mendatang yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah, sehingga akan memberikan informasi mengenai pembangunan kesehatan di Kota Cimahi yang akan mendukung pencapaian tujuan. Berikut adalah tabel tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke- -					Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
			2021	2023	2024	2025	2026			2021	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	59,22 (CC)	60,73 (B)	60,75 (B)	60,78 (B)	60,80 (B)	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	24,88	24,90	24,93	24,95	24,98
2	Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Indeks Kesehatan	83,40	83,42	83,43	83,45	83,46	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,28	0,28	0,32	0,36	0,4

Tujuan dan Sasaran dalam Renja tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan tahun 2023-2026 terdapat tujuan dan sasaran dengan masing-masing indikator yaitu:

1. Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan

Indikator tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas tata kelola pemerintahan yang telah berhasil dicapai. IRB terdiri dari 8 area perubahan. Kondisi awal Indeks Reformasi Birokrasi di tahun 2021 adalah 59,22 (CC) artinya bahwa penerapan reformasi birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja

Sasaran: Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Indikator sasaran yang digunakan dalam Renstra dinas kesehatan, yaitu:

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas tata kelola pada Dinas Kesehatan. Capaian nilai evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2021 adalah 24,88 masih jauh dari target Kota Cimahi Minimal 50.

2. Tujuan: Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia

Indikator tujuan: Indeks kesehatan

Indeks Kesehatan (IK) merupakan salah satu ukuran kualitas hidup manusia yang terdapat dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dibentuk melalui tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Indeks kesehatan Kota Cimahi setiap tahun mengalami peningkatan. Capaian Indeks Kesehatan Kota Cimahi pada tahun 2021 adalah 83,40 meningkat dari tahun 2020 sebesar 83,12. Capaian tersebut lebih baik dari capaian Provinsi Jawa Barat, dimana Indeks Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 adalah 81,89.

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Untuk indikator sasaran yang digunakan dalam Renstra Dinas Kesehatan, yaitu:

Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) dapat dicapai berpedoman pada Permenkes 39 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dengan tujuan untuk meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar, mendukung pencapaian SPM Bidang Kesehatan dan mendukung jaminan kesehatan nasional.

Indeks Keluarga Sehat (IKS) pada periode renstra 2017 s.d 2022 telah ditetapkan sebagai salah satu indikator program. Pada periode 2021, capaian IKS masih rendah dibawah 0,50 dengan kategori tidak sehat. Pada Renstra 2023 s.d 2026 indeks keluarga sehat ditetapkan sebagai IKU Dinas Kesehatan. Kondisi Awal tahun 2021 capaian IKS Kota Cimahi adalah 0,28 dengan dan kondisi akhir Renstra tahun 2026 adalah 0,40.

C. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia khususnya di Kota Cimahi tidak terlepas dari komitmen global untuk turut serta dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan derajat kesehatan manusia Indonesia. Komitmen global bersama saat ini merupakan upaya melanjutkan program Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Capaian indikator SDGs di Kota Cimahi tahun 2021 yang belum mencapai target dan perlu mendapat perhatian adalah pada indikator Persentase peningkatan kategori keluarga sehat dengan target 0,00, dimana di tahun 2020 0,41 diharapkan meningkat menjadi 0,415 pada tahun 2021 dengan realisasi 0 artinya tidak ada kenaikan indeks keluarga sehat hal ini terkendala pada aplikasi pengolahan data Indeks

Keluarga Sehat dari Kementerian sehingga di tahun 2021 dan 2022 indikator tersebut tidak digunakan sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan. Selain itu indikator SDGs yang capaiannya masih rendah adalah Persentase ibu hamil KEK sebesar 22,11% dan Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) sebesar 30.24 dimana indikator tersebut juga termasuk dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan. Dengan demikian untuk di tahun 2023 Indeks Keluarga Sehat diangkat kembali menjadi salah satu indikator kinerja Dinas Kesehatan selain itu akan dibuatkan rencana aksi yang lebih aplikatif dan efektif agar target-target dari indikator SDGs dapat dicapai secara optimal. Berikut ini hasil pencapaian indikator SDGs dalam bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2021.

**Tabel 3. 2 Capaian Indikator SDGs terkait Bidang Kesehatan
Tahun 2021**

NO	INDIKATOR KOTA	TAHUN 2021		
		TARGET	CAPAIAN	KINERJA
1.	Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional	96,0	98,64	102,75
2.	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	98,48	98,48
3.	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	90,0	91,80	102
4.	Persentase akses penduduk terhadap air minum berkualitas	100	98,32	98,32
5.	Persentase akses penduduk terhadap jamban sehat	100	80,91	80,91
6.	Rasio Rumah Layak Huni (Persentase Rumah Sehat)	70	71,40	102
7.	Prevalensi kurang gizi (Balita)	< 10	6,18	68,00
8.	Prevalensi stunting pada balita	<10,8	10,18	94,26
9.	Persentase ibu hamil KEK	< 18	3,98	22,11
10.	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	96,72	96,72
11.	AKI/Rasio Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115,5	196,08	30,24
12.	AKB/Rasio Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup)	6,5	7,06	91,40
13.	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	93,55	93,55
14.	Angka Bebas Jentik (ABJ)	≥ 95	92,1	96,94
15.	Persentase obat pelayanan kesehatan dasar (sesuai Fornas) yang telah diajukan oleh puskesmas	100	100	100
16.	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di fasilitas pelayanan kesehatan	11	9,81	98,10
17.	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	100	97,20	97,20
18.	Persentase Peningkatan kategori keluarga sehat (0,41 menjadi 0,415)	0,005	0	0,00
29.	Persentase pembiayaan kesehatan bagi PBI JKN Kota Cimahi (60 % dari premi)	100	100	100,00
20.	Jumlah Kelurahan ODF	4	4	100

Pelaksanaan program SDGs sejalan dengan pelaksanaan program SPM bidang kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian kesehatan. Saat ini pemerintah daerah telah melaksanakan SPM bidang kesehatan yang mengacu pada Permenkes Nomor 4 tahun 2019. Implementasi pelaksanaan SPM yang dilaksanakan oleh puskesmas yang merupakan ujung tombak yang langsung terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

Pada penyusunan program dan kegiatan tahun 2022, mengacu pada Permendagri nomor 90 tahun 2019. Dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran serta memperhatikan kebijakan dan kondisi yang ada maka untuk memperjelas cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah melalui strategi pembangunan kesehatan, kebijakan dan program kerja sebagai berikut :

1. Strategi

Strategi merupakan langkah - langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, yang selanjutnya dijabarkan dalam beberapa program. Setelah penetapan strategi, selanjutnya akan dioperasionalkan dalam arah kebijakan.

Strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2023-2026 yang terdiri dari 5 (lima) yaitu 4 (empat) strategi berada pada bidang dan 1 (satu) strategi pada sekretariat. Kelima strategi ini disusun berdasarkan besaran permasalahan yang dihadapi oleh dinas kesehatan melalui pemetaan interaksi faktor internal dan faktor eksternal. Adapun strategi tersebut adalah:

1. Optimalisasi Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Optimalisasi Pengelolaan Sediaan Farmasi, dan Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan

Setiap strategi akan dijabarkan dalam beberapa arah kebijakan. Arah kebijakan yang ditetapkan sebanyak 28 arah kebijakan.

2. Kebijakan

Arah kebijakan merupakan langkah selanjutnya dalam penyusunan Renstra perangkat daerah setelah penetapan strategi. Urutan strategi dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun mendatang dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan.

Arah kebijakan merupakan pedoman yang mengarahkan pada pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas serta fungsi perangkat daerah yang lebih tepat, fokus dan rasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Arah kebijakan membantu untuk memperjelas strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Tabel 3. 3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan 2023– 2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Optimalisasi Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar
			Peningkatan ketersediaan obat dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan
			Peningkatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
			Peningkatan Pengelolaan Kejadian Luar Biasa
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Gizi Pada Balita

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga
			Peningkatan Upaya Penyehatan Lingkungan
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan
			Peningkatan Upaya Surveilans Kesehatan
			Peningkatan Pemanfaatan UKM pengembangan di puskesmas
			Peningkatan Upaya Kesehatan Penyakit menular dan Tidak Menular
			Peningkatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat
			Peningkatan Upaya STBM
			Peningkatan Upaya Dukungan Manajemen Puskesmas
			Upaya Peningkatan Cakupan Vaksin di Masa Pandemi
			Peningkatan Akreditasi Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
			Peningkatan Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap dan Boosters
			Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas tenaga kesehatan sesuai standar
		Optimalisasi Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Peningkatan Pengawasan sarana kefarmasian dan Penyediaan Makanan dan Minuman
			Peningkatan Upaya pengawasan PIRT dan PJAS
			Peningkatan Upaya Pengawasan TPM
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan Pembinaan RW Siaga
			Peningkatan Nilai Sakip
			Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN
			Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat

3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2023 terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 6) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 10) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 11) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 13) Pengadaan Mebel
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 14) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 15) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 17) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 18) Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cibeber
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cimahi Selatan
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cimahi Tengah
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cimahi Utara
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Puskesmas Cibeureum

- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cigugur Tengah
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Cipageran
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Citeureup
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Leuwigajah
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Melong Asih
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Melong Tengah
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pasirkaliki
- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Padasuka

II. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

9. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 19) Pembangunan Puskesmas
 - 20) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - 21) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 22) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 23) Pengadaan Obat, Vaksin
10. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 24) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 25) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 26) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 27) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 28) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 29) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

- 30) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- 31) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- 32) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- 33) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- 34) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- 35) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- 36) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 37) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
- 38) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 39) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 40) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 41) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 42) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- 43) Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- 44) Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 45) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 46) Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
- 47) Operasional Pelayanan Puskesmas
- 48) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 49) Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 50) Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
11. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - 51) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
 - 52) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
 - 53) Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
12. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 54) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

13. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 55) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
 - 56) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

IV. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

14. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 57) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
15. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 58) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
16. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - 59) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

V. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

17. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 60) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
18. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 61) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- 19. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 62) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat(UKBM).

Tabel 3. 4 Rumusan Rancangan Awal Rencana Kegiatan Tahun 2023 serta perkiraan maju tahun 2024
Berdasarkan Hasil Forum OPD Bidang Kesehatan

Kode	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Kinerja Maju	Pagu Indikatif Maju (Rp)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78 ,61	80.083.357.151	APBD	78.62	81.026.457.151
		Indeks Profesionalitas ASN	50			50,5	
		Nilai IKM	83			83.82	
		Cost Recovery Rate (CRR)	80 Persen			81 Persen	
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun;	3 dokumen	260.386.100		3 dokumen	260.386.100
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	175.140.700	APBD	5 dokumen	175.140.700
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	85.245.400	APBD	2 Dokumen	85.245.400
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	1 Dokumen	58.704.087.551		1 Dokumen	58.704.087.551
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	416 Orang	58.408.412.551	APBD	416 Orang	58.408.412.551
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	295.675.000	APBD	12 Dokumen	295.675.000

1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Dibina;	100 orang	159.945.000		100 orang	159.945.000
1.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket	24.905.000	APBD	85 Paket	24.905.000
1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 Pegawai	135.040.000	APBD	23 Pegawai	135.040.000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;	12 bulan	759.957.500		12 bulan	759.957.500
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.002.600	APBD	1 Paket	10.002.600
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	134.307.700	APBD	2 Paket	134.307.700
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	137.175.600	APBD	2 Paket	137.175.600
1.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	150.133.600	APBD	4 Paket	150.133.600
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	153.382.000	APBD	12 Bulan	153.382.000
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	174.956.000	APBD	12 Laporan	174.956.000
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan	12 bulan	50.000.000		12 bulan	50.000.000
1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	50.000.000	APBD	3 paket	50.000.000

1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa penunjang urusan	12 bulan	379.771.000		12 bulan	379.771.000
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	APBD	12 Laporan	200.000.000
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	179.771.000	APBD	12 Laporan	179.771.000
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	12 bulan	907.210.000		12 bulan	907.210.000
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Paket	620.970.000	APBD	13 Paket	620.970.000
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau -Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Paket	286.240.000	APBD	4 Paket	286.240.000
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	92.31	18.862.000.000		100	19.805.100.000
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	13 Unit Kerja	18.862.000.000	APBD	13 Unit Kerja	19.805.100.000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1) Rasio Kematian Ibu per 100.000 KH	1) 115,1	44.734.839.745		1) 115	43.616.492.070
		2) Rasio Kematian Bayi per 1000 KH	2) 6,3			2) 6,2	
		3) Rata-rata Capaian SPM	3) 100			3) 100	
		4) Prevalensi Stunting pada balita	4) 10,1			4) 10,0	

		5) Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS	5) 56			5) 58	
		6) Persentase Kelurahan ODF	6) 80			6) 86,67	
		7) Persentase peserta pemeriksaan kebugaran yang mendapat konseling PNS	7) 100			7) 100	
		8) Persentase pelayanan PKM terhadap penyakit yang diduga akibat kerja	8) 35			8) 40	
		9) Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Utama	9) 100			9) 100	
		10) Persentasi Pengadaan Obat sesuai FORNAS	10)100			10)100	
		11) Cakupan Puskesmas dengan capaian IKS di atas 0,28	11) 8			11) 9	
		12) Cakupan UKM pengembangan di puskesmas	12) 13			12) 13	
		13) Capaian UHC	13) 98			13) 98,10	
		14) Cakupan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	14)92.5			14)93.5	
		15) Cakupan Imunisasi Booster (12-23 bulan)	15)66.1			15) 70.8	
		16) Insidensi TB (Per 100.000 Penduduk)	16) 302			16) 302	
		17) Insidensi HIV (Per 1000 Penduduk)	17) 0,07			17) 0,06	
		18) CFR DBD	18) < 1			18) < 1	
		19) Persentase KLB yang ditangani	19) 100			19) 100	
		20) Cakupan Jamaah Haji yang mendapat pemantauan kesehatan haji	20) 100			20) 100	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1) Jumlah Puskemas Dengan Sarana Dan Prasarana Sesuai Standar	1) 13 Puskesmas	6.118.347.675		1) 13 Puskesmas	5.000.000.000

	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2)Presentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	2) 100%			2) 100%	
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 unit	500.000.000	APBD	2 unit	500.000.000
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 unit Cimet	2.118.347.675	APBD	1 unit Cimteng	1.000.000.000
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	0 unit	0	APBD	0 unit	0
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 unit	500.000.000	APBD	3 unit	500.000.000
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2 Paket	3.000.000.000	APBD	2 Paket	3.000.000.000
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	750.000.000	APBD	1 Paket	750.000.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	1) 89	37.992.529.100		1) 90	37.992.529.100
		2) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	2) 28			2) 29	
		3) Jumlah Puskesmas dengan Capaian SPM 100%	3) 100			3) 100	
		4) Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan	4) 13 PKM			4) 13 PKM	
		5) Presentase kegiatan Mobile Promkes	5) 100			5) 100	

	6) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemecuan STBM	6) 100			6) 100	
	7) Persentase tingkat kebugaran ASN minimal Cukup	7) 41			7) 42	
	8) Persentase peningkatan jumlah Pos UKK	8) 15			8) 16	
	9) Peningkatan Cakupan Kepesertaan JKN	9) 0,1			9) 0,1	
	10) Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gigi, laboratorium dan kestrad	10) 85			10) 85	
	11) Persentase Peningkatan Capaian IKS Per Kelurahan	11) 0			11) 14.29	
	12) Cakupan Kelurahan Universal Child Immunisation (UCI)	12) 100			12) 100	
	13) Cakupan Imunisasi Booster campak	13) 66.1			13) 70.8	
	14) Cakupan Imunisasi Booster Dpt Pentabio	14) 67.3			14) 72	
	15) Cakupan keberhasilan pengobatan TB	15) 84.77			15) 85	
	16) Persentase PKM Yang melaksanakan Strategi DOTS	16) 100			16) 100	
	17) Persentase PKM yang melaksanakan Layanan Test HIV	17) 100			17) 100	
	18) Insidensi Rate DBD per 100.000	18) 75			18) 70	
	19) Persentase Laporan Sistem Kewaspadaan Dini Respon (SKDR)	19) 100			19) 100	
	20) Persentase fasyankes yang melaksanakan pemantauan kesehatan Haji	20) 100			20) 100	
	21. Persentase Puskesmas yang melaksanakan penilaian re akreditasi	21) 0			21) 0	

1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,352	155.690.000	APBD	10403	155.690.000
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,293	863.225.000	APBD	10345	863.225.000
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	9,672	100.475.000	APBD	9720	100.475.000
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25,537	56.550.000	APBD	25792	56.550.000
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71,129	192.028.000	APBD	71,129	192.028.000
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135,097	238.401.400	APBD	135,097	238.401.400
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42,969	45.113.400	APBD	43399	45.113.400
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56,388	60.146.400	APBD	56952	60.146.400
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.209	57.894.400	APBD	10311	57.894.400
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	968	164.899.900	APBD	977	164.899.900

1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3269	262.313.000	APBD	3302	262.313.000
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1) 6.039	398.390.000	APBD	1) 6.099	398.390.000
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 dokumen	796.205.000	APBD	12 dokumen	796.205.000
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 dokumen	726.111.800	APBD	12 dokumen	726.111.800
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12 dokumen	88.999.000	APBD	12 dokumen	88.999.000
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 dokumen	218.479.800	APBD	12 dokumen	218.479.800
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 dokumen	362.749.600	APBD	12 dokumen	362.749.600
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 dokumen	111.309.600	APBD	12 dokumen	111.309.600
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	12 dokumen	232.487.300	APBD	12 dokumen	232.487.300
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 dokumen	489.533.000	APBD	12 dokumen	489.533.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 dokumen	24.274.821.000	APBD	12 dokumen	24.274.821.000
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12 dokumen	141,552,400	APBD	12 dokumen	141,552,400

1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	7.011.288.000	APBD	12 dokumen	7.011.288.000
1.02.02.2.02.34	Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12 dokumen	154.673.000	APBD	12 dokumen	154.673.000
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 Unit	713.716.000	APBD	0	713.716.000
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 dokumen	217.029.500	APBD	12 dokumen	217.029.500
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Ketepatan waktu pelaporan Puskesmas	98 persen	223.962.970		98 persen	223.962.970
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	12 dokumen	19.579.000	APBD	12 dokumen	19.579.000
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 dokumen	129.319.200	APBD	12 dokumen	129.319.200
1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	10 Unit	75.064.770	APBD	10 Unit	75.064.770
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Baik	1. 23.07 %	400.000.000		1. 30.77 %	400.000.000
		2. Persentase Puskesmas yang mendapat pembinaan Mutu	2. 100 %			2. 100 %	
		3. Persentase Fasyankes Yang mendapat Rekomendasi	3. 100 %			3. 100 %	

1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	13 puskesmas	400.000.000	APBD	13 puskesmas	400.000.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar	100 Persen	1.242.400.100		100 Persen	1.242.400.100
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Profil Rencana kebutuhan SDM	1) 1 dokumen	1.242.400.100		1) 1 dokumen	1.242.400.100
		2. Rasio tenaga dokter per penduduk	2) 1: 2500			2) 1: 2500	
		3. Rasio bidan per penduduk	3) 1: 1000			3) 1: 1000	
		4. Rasio perawat per penduduk	4) 1: 855			4) 1: 855	
		5. Persentase Nakes Yang Mendapatkan Rekomendasi	5) 100 %			5) 100 %	
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Dokumen	825.000.000	APBD	12 Dokumen	825.000.000
1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12 Dokumen	417.400.100	APBD	12 Dokumen	417.400.100
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1. Persentase sarana kefarmasian dan Penyediaan Makanan dan Minuman sesuai standar	1) 100%	69.629.000		1) 100%	69.629.000

		2. Persentase TPM yang mendapat pengawasan eksternal	2) 100 %			2) 100 %	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasyankes yang mendapat pembinaan	100 %	20.850.000		100 %	20.850.000
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12 Dokumen	20.850.000	APBD	12 Dokumen	20.850.000
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana IRT yang Mendapatkan Rekomendasi	100 Persen	40.854.000		100 Persen	40.854.000
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12 Dokumen	40.854.000	APBD	12 Dokumen	40.854.000

1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1. Persenatse TPM di Bina	100 Persen	7.925.000			7.925.000
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen	7.925.000	APBD	12 Dokumen	7.925.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan strata RW Siaga aktif minimal Mandiri	47	5.580.500		52	5.580.500
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelurahan yang menerapkan Kebijakan Germas	100	5.580.500		100	5.580.500
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen	5.580.500	APBD	12 Dokumen	5.580.500
JUMLAH				126.135.806.496			125.960.558.821

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Rencana kerja tahun 2023 merupakan periode tahun pertama dari pelaksanaan Renstra (transisi) Dinas Kesehatan tahun 2023-2026. Dalam penyusunan rencana kerja tahun 2023 ini, program kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kesehatan Perubahan 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi 2023-2026, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2018-2023, Renstra Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019-2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan memperhitungkan kesesuaian kebutuhan dan kekuatan yang dimiliki, sebagai upaya untuk dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Jumlah anggaran belanja Dinas Kesehatan sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebesar Rp. 114.296.371.573-, dengan sumber dari APBD sebesar Rp. 96.748.015.378,- (83,68%) dan Dana Kapitasi JKN sebesar 18.862.000.000,- (16,32%), sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Pagu Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2023 berdasarkan Sumber Anggaran

NO	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	%
1	APBD KOTA	96.748.015.378,-	83,68
2	KAPITASI JKN	18.862.000.000,-	16,32
	TOTAL	115.610.015.378,-	100,00

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 terdiri dari 5 program, 18 kegiatan dan 72 sub kegiatan. Uraian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023 Berikut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 2 Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	02						96,748,015,378							102,445,589,900		
1	02	01					56,451,358,203							58,162,958,500		
1	02	01	2.01				260,386,100							260,386,100		
1	02	01	2.01	01			4 Dokumen	175,140,700					4 Dokumen	175,140,700	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.01	06			2 Laporan	85,245,400					2 Laporan	85,245,400	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.02					53,634,088,603						55,345,688,900		
1	02	01	2.02	01			416 Orang/bulan	53,088,413,603		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			416 Orang/bulan	54,800,013,900	Dinas Kesehatan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	545,675,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3 Laporan	545,675,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						159,945,000						159,945,000		
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				85 Paket	24,905,000					85 Paket	24,905,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				23 Orang	135,040,000					23 Orang	135,040,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						759,957,500						759,957,500		
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,002,600					1 Paket	10,002,600	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	134,307,700					2 Paket	134,307,700	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	137,175,600					2 Paket	137,175,600	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	150,133,600					4 Paket	150,133,600	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	153,382,000					2 Paket	153,382,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	174,956,000					12 Laporan	174,956,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungjang Urusan Pemerintah Daerah						50,000,000						50,000,000		
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	50,000,000					3 Paket	50,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah						679,771,000						679,771,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktiran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktiran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	500,000,000						12 Laporan	500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	179,771,000						12 Laporan	179,771,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah						907,210,000							907,210,000	
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	620,970,000						13 Unit	620,970,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				4 Unit	286,240,000						4 Unit	286,240,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						39,237,167,775							43,223,142,000	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk URM dan UKP Kemungkinan Daerah Kabupaten/Kota						6,118,347,675							5,000,000,000	
1 02 02 2.01 02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	500,000,000						2 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 unit	2,118,347,675						2 unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Pemunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Pemunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	500,000,000						3 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				2 Paket	2,250,000,000						2 Paket	2,250,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	750,000,000						1 Paket	750,000,000	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
													Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						32,494,858,100						37,599,180,000		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10.352 Orang	275.690.000					10.352 Orang	275.690.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10.293 Orang	1.022.725.000					10.293 Orang	1.022.725.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9672 Orang	100.475.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			9672 Orang	100.475.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25537 Orang	106.550.000					25537 Orang	56.550.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				71129 Orang	192.028.000					71129 Orang	192.028.000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				135097 Orang	185.631.700					135097 Orang	238.401.400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				42969 Orang	506.575.400					42969 Orang	45.113.400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				56388 Orang	54.044.400					56388 Orang	54.044.400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10209 Orang	77.182.400					10209 Orang	77.182.400	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				968 Orang	173.829.900					968 Orang	173.829.900	Dinas Kesehatan

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3289 Orang	262.313.000					3289 Orang	262.313.000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6586 Orang	398.390.000					6586 Orang	398.390.000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						296.205.000						296.205.000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	1.202.111.800					12 Dokumen	1.202.111.800	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	108.800.900					12 Dokumen	108.800.900	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	316.707.000					12 Dokumen	316.707.000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12	362.749.600					12	362.749.600	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	111.309.600					12 Dokumen	111.309.600	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				12 Dokumen	1.408.487.300		PENDAHWTAN ASLI DAERAH (PAD)			12 Dokumen	1.408.487.300	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	681.704.000					12 Dokumen	681.704.000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	24.113.303.700					12 Dokumen	24.113.303.700	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				12 Dokumen	166.341.900					12 Dokumen	166.341.900	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	154.673.000					12 Dokumen	154.673.000	Dinas Kesehatan	

1401001-0000

Kode	Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tingkat Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktis Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktis Mula Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokal	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1	02	02	1.02	06	Investigasi Awal Kejadian Tidak Ditanggapi (Kejadian Rutin Pada Imunitas dan Pemberian Obat Malaria)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Ditanggapi (Kejadian Rutin Pada Imunitas dan Pemberian Obat Malaria)							12 Laporan	217,029,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02		Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi										223,962,000	
1	02	02	1.02	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan							12 Dokumen	19,579,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							12 Dokumen	129,319,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.02	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan							10 Unit	75,064,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									400,000,000		
1	02	02	1.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Diakui Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan							13 Unit	400,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	05			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									901,132,408		
1	02	05	1.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									901,132,408		
1	02	05	1.02	02	Pemeriksaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)							0 Orang 96 Orang	483,732,300	Dinas Kesehatan	

RENCANA KERJA 2023

Kode					Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktis Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktis Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.03	03	Pembiayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembiayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan				12 Dokumen	417,400,100					12 Dokumen	417,400,100	Dinas Kesehatan	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						101,175,000						101,175,000		
1	02	04	2.01		Pemberian Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						20,850,000						20,850,000		
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				12 Dokumen	20,850,000					12 Dokumen	20,850,000	Dinas Kesehatan	
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Ijin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						40,854,000						40,854,000		
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Ijin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Ijin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				12 Dokumen	40,854,000					12 Dokumen	40,854,000	Dinas Kesehatan	
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laka Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Dapur Air Minum (DAM)						55,475,000						55,475,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktikan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktikan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2025	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laki Higien Sanitasi Tempat Tenggelapan Makanan (TPM) antara lain Jasa Soga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laki Higien Sanitasi Tempat Tenggelapan Makanan (TPM) antara lain Jasa Soga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	30,475,000						12 Dokumen	30,475,000	Dinas Kesehatan	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						57,178,806							57,178,806		
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kampanye, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Linier Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						57,178,806							57,178,806		
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kampanye dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kampanye dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	57,178,806						12 Dokumen	57,178,806	Dinas Kesehatan	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,926,637,696							1,917,971,806		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,926,637,696							1,917,971,806		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1,926,637,696							1,917,971,806		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,926,637,696							1 Unit Kerja	1,917,971,806	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,473,860,000							1,547,553,506		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,473,860,000							1,547,553,506		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1,473,860,000							1,547,553,506		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tingkat Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prestasi Capaian Tingkat RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prestasi Maje Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tingkat 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Tingkat	Pagu Indikatif		
										Nasional	Daerah					
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Pemungjung Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemungjung Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemungjung Pelayanan				0 Unit Kerja 1 Unit Kerja	1,473,860,000						2 Unit Kerja 1 Unit Kerja	1,547,353,000	Dinas Kesehatan	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						992,624,000							1,642,256,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						992,624,000							1,642,256,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						992,624,000							1,642,256,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Pemungjung Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemungjung Pelayanan				1 Unit Kerja	992,624,000						1 Unit Kerja	1,042,256,000	Dinas Kesehatan	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,478,039,000							1,551,933,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,478,039,000							1,551,933,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1,478,039,000							1,551,933,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Pemungjung Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemungjung Pelayanan				1 Unit Kerja	1,478,039,000						1 Unit Kerja	1,351,303,000	Dinas Kesehatan	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,775,796,000							1,864,586,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,775,796,000							1,864,586,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1,775,796,000							1,864,586,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Pemungjung Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemungjung Pelayanan				1 Unit Kerja	1,775,796,000						1 Unit Kerja	1,654,586,000	Dinas Kesehatan	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,760,339,000							1,848,356,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,760,339,000							1,848,356,000		
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1,760,339,000							1,848,356,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktoran Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Praktoran Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokal	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.760.000.000						1 Unit Kerja	1.649.346.000	Dinas Kesehatan
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.607.385.000						1.607.762.000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.607.385.000							1.607.762.000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.607.385.000							1.607.762.000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.607.385.000						1 Unit Kerja	1.607.762.000	Dinas Kesehatan
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.357.186.000						1.425.046.000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.357.186.000							1.425.046.000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.357.186.000							1.425.046.000	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.357.186.000						1 Unit Kerja	1.425.046.000	Dinas Kesehatan
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.114.893.304						2.220.631.500	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.114.893.304							2.220.631.500	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.114.893.304							2.220.631.500	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.114.893.304						1 Unit Kerja	2.220.631.500	Dinas Kesehatan
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1 02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						672.082.000						705.687.000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						672.082.000							705.687.000	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						672.082.000							705.687.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Praktis Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kategori Sasaran	Praktis Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokal	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Pemunjang Pelayanan SLUD	Jumlah SLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	672,082,000						1 Unit Kerja	709,687,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1,916,386,000							2,612,206,900	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,916,386,000							2,612,206,900	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan SLUD						1,916,386,000							2,612,206,900	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Pemunjang Pelayanan SLUD	Jumlah SLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1,916,386,000						1 Unit Kerja	2,012,206,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						951,529,000							999,107,900	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						951,529,000							999,107,900	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan SLUD						951,529,000							999,107,900	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Pemunjang Pelayanan SLUD	Jumlah SLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	951,529,000						1 Unit Kerja	999,107,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						935,243,000							982,005,900	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						935,243,000							982,005,900	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan SLUD						935,243,000							982,005,900	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Pemunjang Pelayanan SLUD	Jumlah SLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	935,243,000						1 Unit Kerja	982,005,000	Dinas Kesehatan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						197,506,319,145							261,416,129,000	
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai SATOP Perangkat Daerah	Indeks Total		Indeks Total	50.00 Indeks 55.00 Nilai	52,506,319,145						50.00 Indeks 55.00 Nilai	56,416,129,000	
1 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	14 Laporan		0 Laporan	14 Laporan	52,506,319,145						14 Laporan	56,416,129,000	

Kode						Uraian/ Bidang Uraian/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prestasi Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prestasi Maje Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023	Pagu Indikatif	Lokal	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
															Nasional	Daerah				
1	02	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				800 Orang/bulan	82.506.319.145	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN RSUD Cibabat Kota Cimahi	800 Orang/bulan	82.416.129.000	RSUD CIBABAT
1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kegiatan Masyarakat - RSUD Cibabat	81.00 Indeks		8 Indeks	80.00 Indeks	145.000.000.000						80.00 Indeks	145.000.000.000	

BAB V

PENUTUP

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 merupakan hasil tahun ke empat dari pelaksanaan dokumen perencanaan jangka menengah Renstra Dinas Kesehatan periode 2017-2022 dimana pada tahun 2021 telah mengalami perubahan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Hasil evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada renja tahun 2021 tentunya menjadi salah satu bahan kebijakan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2023.

Dokumen Rencana Kerja tahun 2023 merupakan pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) transisi Dinas Kesehatan tahun 2023-2026, menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2023-2026. Selain itu rencana kerja tahun 2023 juga mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Jawa Barat tahun 2018-2023 dan Renstra Kementerian Kesehatan RI tahun 2019-2024 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan memperhitungkan kesesuaian kebutuhan dan kekuatan yang dimiliki, sebagai upaya untuk dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Komitmen dan dukungan dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Cimahi sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun di dalam dokumen Rencana Kerja tahun 2023 ini. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, dan sasaran Dinas Kesehatan.



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lantai III
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Telp / Fax 022-6632197 Kota Cimahi